

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, telaah berbagai dokumen resmi lintas sektoral, serta analisis mendalam yang telah dipaparkan pada Bab V dengan menggunakan Kerangka Kerja Empat Kuadran *Policy Implementation Outcomes* dari Genia Kostka, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili/zonasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Padang Panjang menghasilkan pola dampak yang kompleks dan saling berkaitan, sehingga tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai keberhasilan atau kegagalan tunggal.

Dari aspek *realized goals*, kebijakan ini berhasil mencapai tujuan yang sejak awal dirancang secara sadar, terutama dalam hal perluasan akses pendidikan melalui Jalur Afirmasi serta efisiensi jarak tempuh antara rumah dan sekolah. Sistem Smart Edu berhasil mengalokasikan kuota Jalur Afirmasi pada kisaran 15-20 persen dan menyalurkan 60 siswa dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran, yang validitasnya terkonfirmasi melalui pencocokan dengan database Program Indonesia Pintar (PIP) nasional kategori P3KE Desil 1 dan 2. Selain itu, pembagian wilayah ke dalam Zona 1 dan Zona 2 terbukti mampu mengurangi jarak tempuh rumah-sekolah secara signifikan, sehingga berdampak pada efisiensi biaya transportasi harian keluarga, peningkatan keselamatan mobilitas siswa, serta perubahan pola mobilitas harian siswa yang lebih banyak dilakukan dengan berjalan kaki.

Pada saat yang sama, perubahan orientasi dari seleksi berbasis nilai akademik menuju kedekatan geografis juga melahirkan sejumlah *Trade-offs* yang sejak awal telah disadari sebagai konsekuensi kebijakan. Pergeseran ini memunculkan ketidakseimbangan distribusi pendaftar antar sekolah, di mana SMPN 1 dan SMPN 5 mengalami kelebihan kapasitas, sementara SMPN 3 mengalami jumlah pendaftar yang sangat rendah. Di tingkat kelas, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan pembelajaran akibat heterogenitas kemampuan siswa yang tinggi atau *mixed-ability classroom*, dimana mayoritas siswa berada pada kategori Pemahaman Sebagian (58 persen) dan Belum Berkembang (13 persen), sehingga guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran melalui pendekatan yang lebih bervariasi.

Selanjutnya, implementasi kebijakan ini juga menghasilkan *Serendipities* atau manfaat positif yang tidak direncanakan sebelumnya. Tekanan kebijakan zonasi turut mendorong modernisasi layanan transportasi pelajar melalui integrasi sistem digital pada Program Angkot Gratis Pelajar berbasis aplikasi ApelPapa Bank Nagari dengan sistem tap poin. Program ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi para pengemudi angkutan, tetapi juga mendorong adaptasi teknologi digital pada kelompok yang sebelumnya belum terbiasa dengan sistem tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga keberlangsungan rombongan belajar di sekolah pinggiran seperti SMPN 2 dan SMPN 3 melalui masuknya siswa dari wilayah perbatasan Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus berkontribusi pada pemenuhan beban kerja mengajar guru agar tetap memenuhi ketentuan sertifikasi profesi. Di tingkat sekolah, kondisi ini juga mendorong munculnya berbagai inovasi internal secara mandiri, seperti program

ekologis STOP SSUNDOK dan pengembangan Smart Classroom di SMPN 4 sebagai upaya meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan *Classic Negative Unintended Consequences* yang bersifat struktural dan tidak sepenuhnya diperkirakan sebelumnya. Ketentuan domisili yang ketat mendorong munculnya berbagai upaya penyesuaian administratif dalam proses pendaftaran. Selain itu, ditemukan pula indikasi adanya intervensi informal dalam proses penerimaan peserta didik yang mempengaruhi sebagian hasil seleksi di tingkat operasional. Dari sisi teknis, aplikasi Smart Edu juga menghadapi keterbatasan, baik pada kapasitas server maupun akurasi pembacaan koordinat GPS yang mencapai sekitar 25 persen, sehingga menimbulkan ketidakpastian data dan menurunkan tingkat kepercayaan sebagian pengguna. Pada akhirnya, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap penguatan konsentrasi siswa berprestasi pada sekolah tertentu, sementara sebagian sekolah pinggiran mengalami penurunan jumlah siswa serta keterbatasan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas fisik.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa kebijakan zonasi di Kota Padang Panjang secara substansial telah berhasil mencapai tujuannya pada dimensi pemerataan akses, khususnya melalui jalur afirmasi yang berhasil menjangkau kelompok kurang mampu sesuai basis data P3KE. Namun, kebijakan ini belum berhasil menghapus dikotomi sekolah favorit dan non-favorit yang menjadi salah satu tujuan eksplisitnya, sebagaimana tercermin dari tatap tingginya konsentrasi peminat pada SMPN 1 dan SMPN 5 serta menurunnya jumlah pendaftar di

sekolah seperti SMPN 3. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan zonasi di Kota Padang Panjang bersifat parsial dan berlapis, positif pada dimensi akses fisik dan ekonomi, namun ambigu hingga negatif pada dimensi pemerataan kualitas dan keadilan antar sekolah. Zonasi terbukti efektif sebagai instrumen redistribusi akses jangka pendek, tetapi belum menyentuh determinan struktural ketimpangan mutu antar sekolah yang menjadi akar dari preferensi masyarakat terhadap sekolah favorit.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Sebelum menguraikan kontribusi akademis, peneliti perlu menyampaikan sejumlah keterbatasan penelitian ini secara terbuka. Pertama, desain penelitian kualitatif berbasis studi kasus tunggal di Kota Padang Panjang membatasi generalisasi temuan ke kota atau kabupaten lain dengan karakteristik demografis dan kapasitas layanan Pendidikan yang berbeda. Kedua, penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hubungan kausal secara langsung antara kebijakan zonasi dengan berbagai program pendidikan lain yang dilaksanakan secara bersamaan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Oleh karena itu, atribusi terhadap *policy outcome* dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsistensi temuan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen melalui proses triangulasi, bukan melalui desain penelitian yang bertujuan mengisolasi pengaruh setiap kebijakan secara eksperimental. Ketiga, bukti kausal atas kategori serendipity pada program angkot gratis pelajar terbatas pada triangulasi dokumen tanpa data pembanding skala penggunaan sebelum dan sesudah penerapan zonasi. Keempat,

rentang waktu penelitian hanya mencakup satu siklus PPDB (2024-2025), sehingga belum dapat menangkap tren perubahan *outcome* dalam jangka panjang.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain multi-kasus atau komparatif antar kota/kabupaten untuk menguji generalisasi pola kuadran Kostka pada konteks zonasi di Indonesia, melibatkan data longitudinal lintas tahun ajaran, serta memperluas cakupan informan pada unsur tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan non-formal lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak selalu menghasilkan *outcome* yang bersifat tunggal, melainkan dapat melahirkan capaian yang diharapkan, kompromi kebijakan, dampak positif yang tidak direncanakan, serta konsekuensi negatif yang muncul dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas penerapan kerangka *Policy Outcome* Genia Kostka pada berbagai konteks kebijakan publik lainnya maupun pada implementasi kebijakan zonasi di daerah yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan kapasitas layanan pendidikan yang berbeda. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori *policy outcome* sekaligus menguji konsistensi pola *outcome* kebijakan dalam berbagai konteks implementasi.

Selain itu, penelitian mendatang disarankan menggunakan desain penelitian komparatif atau multi-kasus antar daerah serta memanfaatkan data longitudinal lintas tahun pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pendekatan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika *outcome* kebijakan dari waktu ke waktu, sekaligus memperkuat analisis mengenai hubungan

antara desain kebijakan, implementasi, dan konsekuensi yang dihasilkan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) agar hubungan antara kebijakan zonasi dan berbagai *outcome* yang muncul dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan memiliki dasar empiris yang lebih kuat.

6.2.2 **Saran Praktis**

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kota Padang Panjang dan Dinas Pendidikan perlu memandang kebijakan zonasi tidak hanya sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan, tetapi juga sebagai kebijakan yang menghasilkan berbagai konsekuensi sosial dan kelembagaan yang memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sebaiknya tidak hanya berfokus pada ketercapaian kuota penerimaan peserta didik, tetapi juga mencakup pemerataan kualitas sekolah, distribusi peserta didik, persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri, serta berbagai dampak yang muncul setelah kebijakan diterapkan.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pemerataan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, distribusi guru yang lebih proporsional, serta pengembangan program unggulan pada sekolah yang selama ini kurang diminati masyarakat. Upaya tersebut penting untuk mengurangi stigma sekolah favorit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah negeri di Kota Padang Panjang.

Untuk meminimalkan konsekuensi negatif yang ditemukan dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan juga perlu memperkuat sistem verifikasi data domisili melalui integrasi data kependudukan dengan instansi terkait serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi manipulasi administrasi. Di samping itu, penyelenggaraan SPMB berbasis digital perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan informasi, penyediaan posko pendampingan bagi orang tua, dan penyempurnaan sistem Smart Edu agar proses penerimaan peserta didik berlangsung lebih transparan, akunTabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terakhir, berbagai *outcome* positif yang muncul di luar tujuan awal kebijakan, seperti berkembangnya inovasi sekolah dan pelaksanaan Program Angkutan Pelajar Gratis, perlu dipertahankan dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pengembangan kebijakan pendidikan daerah. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian berbagai permasalahan implementasi, tetapi juga pada penguatan berbagai *outcome* positif yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.